

# PARIWISATA YANG BERWAWASAN KEMANUSIAAN : SEBUAH REFLEKSI SPIRITUALITAS

Oleh

Marimin

(Dosen pada Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta)

## RINGKASAN

Wacana kepariwisataan saat ini memerlukan refleksi serius mengingat tantangan yang dihadapi (*environmental scanning*) dan tingkat kemampuan analisis proaktif terhadap masa depan bangsa dan pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Dalam konteks ini perlu dicermati perkembangan dua paradigma pariwisata yang mengandung persoalan substantif tentang kepariwisataan yakni upaya mendefinisikan (*redefine*) pariwisata dalam format multi-dimensi, ilmiah dan komprehensif. Paradigma pertama adalah pariwisata sebagai fenomena manusia yang merupakan resultante reaksi psikologis akibat dari munculnya kebutuhan (*drive* dan *motive*) untuk melakukan perjalanan hasil reproduksi push and pull factor, kedua adalah pariwisata sebagai suatu industri. Benturan terhadap dua platform ini dapat dihindari manakala pihak-pihak yang berkompeten (stakeholder pariwisata) menyadari esensi dasar dari paradigma diatas. Yang menjadi persoalan saat ini adalah ketika pelaku terlalu berlebihan dalam meng-intreprestasikan perannya seperti over komersialisasi dari tour operator atau kebanggaan sektoral instansi dan dinas pelayanan pariwisata yang berlebihan karena vested-interest tertentu, atau pembangunan kawasan dan sarana pariwisata (hotel / objek wisata) yang mengabaikan faktor lingkungan hidup dan daya dukung (*carrying capacity*) dan pemberdayaan masyarakat sebagai aset utama pariwisata. Tentu saja sinergi pendekatan paradigma diatas akan menghasilkan tatanan kepariwisataan yang harmonis, bermanfaat dan berakar dalam komunitas (community base tourism) meminimalisasi praktik bisnis yang sematamata berpikir: we sell everything, profit oriented dan pragmatic).

**Kata kunci:** *environmental scanning, community based tourism.*

## PENDAHULUAN

De Kadt dalam buku: *Tourism is a passport to development* (1979) menggugat esensi pokok kepariwisataan yang bagi sebagian orang dianggap sebagai tiket untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Tidak berlebihan anggapan ini, namun pada kenyataannya hal tersebut tetap menjadi semangat utopia masyarakat dan lingkungan kita. Dalam konteks yang sama

ada pelbagai harapan yang digantungkan kepada pariwisata terlebih dengan melihat peluang pada sektor *small scale industries, gender, diversifikasi produk wisata (ecotourism, agrotourism, forest tourism)* pemberdayaan, penyerapan tenaga kerja dan sebagainya.

Analisis pariwisata Geoffrey Wall (1994) dalam salah satu diskusi mengemukakan bahwa solusi efektif dari

permasalahan tidak harus bergantung kepada kepariwisataan. *Tourism is not a magic solution for economic problem*. Hal ini logis karena orang masih beranggapan bahwa kepariwisataan dapat menyembuhkan proses pembangunan masyarakat di desa dan kota. Lebih jauh kita jernihkan bahwa fenomena kepariwisataan perlu dikaji apakah semua persoalan seperti kerusakan alam dan budaya hanya disebabkan oleh kegiatan dan industri pariwisata. Tesis pemikiran ini perlu dicuatkan mengingat pariwisata mengandung multikarakteristik yang kompleks sebagaimana usaha jasa pada umumnya (*perishable, intangible, variability, complexity dependability*) sehingga keterkaitannya dalam sistem pariwisata seyogyanya dicermati secara utuh.

Cooper Chris (1997) menggaris bawahi tentang munculnya persepsi yang berkembang di masyarakat lebih dipengaruhi oleh kesalahan interpretasi tentang hakekat pariwisata. Dalam diskusi ini Cooper menggambarkan empat periode perkembangan kepariwisataan di suatu negara yang berbasis pada karakteristik dan pilihan pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup, antara lain: Periode tahun 1950-an pariwisata berkembang secara *co-existence* dengan bidang lain karena memberikan kontribusi/dampak positif. Periode tahun 1960-an terjadi proses pengrusakan lingkungan hidup (*deterioration*). Periode tahun 1970-an adalah masa konflik kepentingan antara pariwisata dan bidang lain sehingga terjadi benturan dalam tahap perkembangan kepariwisataan.

Periode tahun 1980/1990-an telah mulai terjadi kesadaran ilmiah dengan pendekatan yang lebih komprehensif sehingga muncul model pengembangan

pariwisata simbiotik yang mengarah kepada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (*tourism sustainable development*) dan alternatif tourism.

Gugatan Mathieson and Wall (1993) dikemukakan melalui pertanyaan-pertanyaan yang esensi dan kritis kepada pelaku-pelaku pariwisata seperti: manfaat apa dari pengeluaran wisatawan bagi masyarakat di sebuah destinasi? Apakah pariwisata meningkatkan prostitusi, kriminalitas dan perjudian? Apakah pariwisata melestarikan seni tradisional dan kerajinan serta budaya setempat? Apakah pemerintah lebih mengarahkan prioritas pembangunan pariwisata untuk memuaskan wisatawan/pengunjung dari pada penduduk setempat? Apakah penduduk setempat memberlakukan fasilitas wisata yang mahal melalui pajak? Apakah pariwisata ikut berperan merusak sumber daya yang semula memiliki daya tarik bagi wisatawan? Apakah terdapat tingkat kejenuhan dalam daur hidup produk wisata yang diakibatkan oleh tingkat pertumbuhan dari kedatangan wisatawan yang lebih menimbulkan masalah ketimbang maslahat? Apa yang sedang dilakukan untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan wisatawan dan menjamin bahwa hal tersebut tidak melebihi ukuran yang ideal?

Sementara itu pola dan gerak pembangunan pariwisata Indonesia masih memperlihatkan sikap yang belum sepenuhnya profesional dan ilmiah. Hal ini misalnya dibuktikan oleh masih kurangnya kajian ilmiah yang dilakukan oleh pelaku industri pariwisata. Sebagai contoh: penerapan konsep *product positioning* bagi *tour operator* di Indonesia hanya sekitar 15% menerapkan konsep *research based product* dan tentu saja ini pasti sangat berpengaruh pada keunggulan kompetitif produk wisata Indonesia

(Teguh, 1997). Atau misalnya pemusatan pembangunan hotel disuatu kawasan tertentu yang tidak mengindahkan lingkungan hidup atau masih sedikitnya usaha jasa pariwisata dan perhotelan di Indonesia yang memiliki sertifikasi ISO.

Tiga proposisi dikemukakan oleh Voase (1996) sebagai referensi dalam mengkristalisasi model pengembangan pariwisata masa mendatang. Pertama, pariwisata adalah manusia menggantikan konsepsi pariwisata sebagai tempat dan objek wisata semata-mata (*tourism as people replacing tourism as place*); kedua, pariwisata sebagai sustainable domesticity yang mengandung pengertian kelestarian dan kelangsungan sumber daya setempat dengan tantangan pada upaya memformulasikan pariwisata sebagai bentukan aktivitas manusiawi, dan sistem industri kepariwisataan yang berkelanjutan; ketiga, pariwisata sebagai metaforis proses keseimbangan dan harmonisasi dalam tatanan hubungan kemanusiaan, antar individu (*guest-host relationship*), bangsa dan negara sehingga mengurangi bentuk dan kecenderungan imperialisme baru (*tourism into equilibrium*).

Bagaimanapun tantangan yang perlu direkayasa secara positif adalah upaya memberdayakan segala potensi dan sumber daya pariwisata sebagai manifestasi proses transformasi nilai. Yang dimaksudkan disini adalah proses penuluran nilai lokal yang satu ke nilai lokal yang lain (*tourism values exchange*) melalui persahabatan manusia sehingga menghasilkan keserasian dan keharmonisan nilai yang dapat diterima oleh semua pihak secara menyenangkan antara dua belah pihak. Pada tatanan ini koridor nilai merujuk pada nilai universal sesuai tuntunan suara hati. Artinya, kebutuhan akan reorientasi

pengembangan pariwisata memasuki tatanan nilai budaya, norma dan etika serta keagungan kepribadian manusia dengan menjunjung harkat dan martabat. Tentu saja praktek pemberdayaan pariwisata yang terlalu menimbulkan dampak negatif perlu diminimalisasi dalam konteks pariwisata yang luhur, adil dan mulia sehingga pariwisata lebih efektif dan kreatif menjawab persoalan-persoalan bangsa dan masyarakat yang terjadi di Indonesia saat ini. Pemikiran yang jauh kedepan seyogyanya mengiringi keinginan para pelaku pariwisata yang terjun dalam bidang jasa ini.

Sintesis pariwisata Indonesia adalah proses sinergi nilai ekonomis, budaya dan masyarakat serta yang lebih penting adalah menanamkan jiwa dan semangat spiritualitas ke arah visi strategis pariwisata Indonesia sebagai aset nasional dan proses pendidikan masyarakat internasional. Disini yang paling substantif adalah bagaimana merumuskan nilai spiritualitas dalam praktek pariwisata kita.

Dengan demikian, hakekat spiritualitas dalam pariwisata adalah pengumpulan dan penziarahan fisik dan non-fisik dalam aura perjalanan iman ke destinasi rohani dengan mengalami pengayaan nilai alam, budaya dan pelayanan manusia. Penempatan subjek manusia merespons kebutuhan insani yang mengandung nilai humanis universal. Dalam konteks ini kekuatan spiritualitas pariwisata terletak pada aspek pengelolaan yang harmonis terhadap tuntutan kebutuhan dan kemampuan apresiasi nilai perjalanan.

Isu *service quality, hospitality, competitive advantage, benchmarking* dan lain-lain yang merupakan produk industrialisasi seyogyanya ditempatkan dalam konteks yang proporsional sehingga menghindari proses reduksi nilai-nilai luhur

dalam pariwisata. Implikasi dari praktek yang lebih mendewakan semangat industrialisasi akan menghasilkan proses dehumanisasi dan denaturalisasi yang sulit dikontrol. Mengapa? Karena bagaimanapun perdebatan tentang konsepsi *tourism value* pasti akan menyentuh dengan totalitas aspek kehidupan manusia yang kompleks. Nilai luhuryang dimaksudkan disini adalah kandungan etika, moral dan norma universal seperti peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai destinasi final pembangunan nasional.

Masyarakat agamawan tampil cukup proaktif merespons fenomena demoralisasi dan denaturalisasi proses pembangunan kepariwisataan. Hal ini juga menjadi komitmen politis dan pesan moral pembangunan pariwisata yang tertuang dalam GBHN 1998. Intisari dari penjabaran arah pembangunan pariwisata adalah bahwa peningkatan pembangunan pariwisata tidak selalu mengabdikan kepada kepentingan ekonomis namun juga menyentuh aspek konservasi budaya, identitas bangsa, harkat dan martabat manusia sehingga menghindari dekadensi nilai dipelbagai bidang terkait.

Salah satu pesan moral adalah bahwa pariwisata yang baik perlu dikembangkan dan didorong. Arahnya menuju ke peningkatan diri rakyat bahwa tanah airnya dapat dibanggakan. Maka pengembangan itu tidak boleh menghancurkan identitas suku dan daerah atau harkat diri manusia. Industri pariwisata hendaknya ditumbuhkan dengan membangkitkan cinta daerah dan tanah air secara sehat. Juga dalam hal pariwisata, manusia perlu mendapat prioritas perhatian. Harus diakui bahwa pengejawantahan komitmen ini sebagai sikap normatif agak sulit ketika manusia dan pelaku pariwisata berhadapan dengan

muatan nilai yang berbeda serta semakin menipisnya dinding moralitas dan etika dunia usaha. Hal ini tentu saja mengakibatkan munculnya permisivisme dan eksklusivisme perilaku yang cenderung membenarkan praktek-praktek manipulasi nilai kemanusiaan karena tekanan dan tuntutan hidup. Alangkah sulit pencernaan kita terhadap pemahaman spiritualitas personal dan komunal. Karena yang diharapkan dalam pemahaman spiritualitas adalah resonansi gerak individu melalui praktek profesi yang terdalam karena berhubungan dengan kebenaran dalam terang religiositas. Namun ketika tercipta hegemoni nilai universal dan uniformitas pasti hal itu berbenturan dengan nilai pariwisata yang indah, menarik, lokal dan kepesonaan serta harmonisasi pengalaman. Pada tatanan yang sama nilai spiritualitas, tidak pernah berjarak dengan proses industrialisasi dan profesi pariwisata karena keterlibatan manusia sebagai subjek dan objek dalam kegiatan pariwisata mutlak. Dengan demikian pertanyaan substantif adalah sejauhmana kita meletakkan batas moral, etika dan religiositas dalam praktek usaha jasa kepariwisataan. Ketika kepariwisataan perse menghasilkan komoditi dalam pelbagai bentuk dan format secara simultan sebenarnya terjadi proses kristalisasi nilai spiritualitas. Dalam konteks ini, paling tidak kita memahami dan mencoba mengatasi krisis nilai kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Inskeep, Edward. 1988. *Tourism Planning- An Integrated and Sustainable Development Approach*, Van Nostrand Reinhold. New York.

Lundberg,

Reisinger, Y dan Steiner, C.J. 2006.  
Reconceptualizing Object Authenticity,  
Annals of Tourism Research, Vol.33,  
No 1, hal 65-86.

Vogels, C.J. 2002. *Tourism as Tool for  
Empowerment of Local Communities in  
Kerala, India*. Paper prepared for CMC  
and WIN Society.<http://www>.